



**Semua Wajib Pakai Masker!**

Jangan pernah lepas saat bertemu orang lain.



# Wapres: Tegakkan Kesetaraan bagi Semua Tanpa Terkecuali

**JAKARTA** - Wakil Presiden Ma'rif Amin menyerukan kepada semua pihak untuk menegakkan kesetaraan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Seruan itu menjadi satu hal pesan yang ditekankan Wapres dalam sambutannya pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022, di Jakarta, Senin (12/12).

runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia. Ketiga, Wapres memandang perlunya sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut, di mana harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia tersebut, dia menyampaikan terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.

Pada kesempatan itu Wapres juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

"Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022. Mari jadikan peringatan Hari HAM Sedunia sebagai momen untuk meneguhkan pemajuan HAM bagi setiap orang menuju Indonesia Maju," ujarnya. (ANTARA)



ANTARA/HO-BPMI Setwapres/aa  
**Wapres Ma'rif Amin saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 Tahun 2022, di Jakarta, Senin (12/12/2022).**

"Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan Hari HAM Sedunia tahun ini, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali," seru Wapres.

Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, Wapres menekankan pentingnya untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

Dia menegaskan bahwa sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan

## KPU Yakin Pemerintah Segera Terbitkan Perpu Pemilu 2024

**JAKARTA** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 guna mengakomodasi regulasi pemilu di daerah otonomi baru (DOB).

"Kami berkeyakinan Pemerintah segera menerbitkan perpu Pemilu karena tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, itu harus dilaksanakan di DOB yang undang-undangnya sudah ada," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (12/12).  
Merujuk pada undang-und-



ANTARA/Bojke Ledy Watra/aa  
**Idham Holik**

dang pembentukan empat provinsi baru, khususnya di pasal 20, dijelaskan bahwa ketentuan pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD setempat pada Pemilu Serentak 2024 diatur lebih lanjut dalam undang-undang pemilihan umum.

"(Tanggal) 16 sampai dengan 29 Desember adalah tahapan atau jadwal penyerahan hubungan syarat minimal bakal calon DPD yang diserahkan ke KPU provinsi di masing-masing provinsi," tambah Idham.

Dia menambahkan empat provinsi baru di Tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, juga akan menyelenggarakan tahapan pencalonan DPD RI tersebut.

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya; sehingga nanti ketika perpu ini terbit, kami akan bergerak dengan cepat. Sehingga, tahapan penyelenggaraan

pemilu di sana dapat sama dengan tahapan penyelenggaraan pemilu di 34 provinsi lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan perpu terkait Pemilu Serentak 2024 akan diterbitkan setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diundangkan. "Begitu (UU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya) diresmikan, baru perpu keluar. Perpu ini sudah kami rapatkan, sudah dirapatkan dengan konsinyering dengan stakeholder yang terkait, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR; sehingga substansinya paham," kata Tito. (ANTARA)

## DIY Jadi Destinasi Wisata Pernikahan Unggulan pada 2023



ANTARA FOTO/Hendra Nurdiansyah/wsj

**Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (kanan) bersama istrinya Erina Gudono (kiri) menaiki kereta kencana usai prosesi akad nikah di Royal Ambarrukmo, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022).**

**YOGYAKARTA** - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) layak diproyeksikan menjadi destinasi wisata pernikahan unggulan pada 2023 setelah prosesi akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono sukses digelar di provinsi ini.

"Berkat Kaesang effect ini sebenarnya kita bisa tangkap dan menjadi triger untuk mempersiapkan Yogyakarta menjadi the next wedding destination setelah Bali dan beberapa daerah lain," kata Ketua DPD GIPI DIY Bobby Ardiyanto saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (12/12).

Seperti dalam prosesi akad nikah putra bungsu Presiden Joko Widodo

(Jokowi) pada Sabtu (10/12) di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, menurut Bobby, menunjukkan bahwa Yogyakarta memang memiliki potensi besar sebagai destinasi penyelenggaraan pernikahan adat.

Potensi yang dimiliki DIY, menurut dia, antara lain banyaknya lokasi menarik atau objek wisata dengan pemandangan alam yang indah yang dapat dijadikan tempat pernikahan.

Selain itu terdapat pula Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sumber sekaligus kiblat standar pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa bergaya Yogyakarta.

"Sumber budaya yang masih hidup inilah yang harus kita uri-uri (lestakan) dan benar-benar jadi

satu standar atau pakem. Harapannya setiap orang yang ingin menggelar pernikahan dengan adat Jawa dia akan melihat Yogyakarta sebagai satu standar yang bisa jadi acuan," ujar dia.

Banyaknya SDM serta jasa layanan acara pernikahan (wedding organizer) berpengalaman dan terkemuka di Yogyakarta, menurut dia, juga menjadi nilai tambah provinsi ini sebagai destinasi pernikahan unggulan.

Ia meyakini mempromosikan DIY sebagai destinasi pernikahan unggulan akan mampu meningkatkan Length of Stay (LoS) atau lama tinggal wisatawan di DIY. "Lama tinggal wisatawan bisa lebih lama. Dengan acara pernikahan (lama tinggal) bisa sampai seminggu," ujar dia.

Namun demikian, lanjut Bobby, untuk mewujudkan DIY sebagai destinasi pernikahan unggulan pada 2023, dibutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota serta pelaku industri pariwisata di provinsi ini.

"Pemerintah daerah perlu intervensi untuk bersama menumbuhkan SDM dari industri pariwisata dan acara pernikahan untuk berkolaborasi, menata bagaimana destinasi wisata Yogyakarta ini bisa kita jual menjadi destinasi pernikahan yang premium," ujar dia. (ANTARA)

## PESAN TENTANG KOLABORASI GLOBAL UNTUK EKONOMI HIJAU DAN MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam *side event* penyelenggaraan G20 yang berlangsung di Bali pada November 2022 menggalang kolaborasi global untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan dan juga upaya-upaya menghadapi perubahan iklim.

“

Kegiatan Seminar Internasional LPS ini merupakan *side events* Presidensi G20 Indonesia. Melalui kegiatan seminar ini, LPS ingin mendorong para otoritas penjamin simpanan di seluruh dunia, baik anggota International Association of Deposit Insurers (IADI) atau bukan, untuk menyerukan tindakan nyata untuk melawan perubahan iklim dan mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan dan hijau”

**Purbaya Yudhi Sadewa**  
Ketua Dewan Komisiner LPS  
Dalam Seminar Internasional LPS 2022,  
9 November 2022.



“

Ini hal yang sangat fantastis bahwa Indonesia melalui LPS dapat menggunakan kesempatan Presidensi G20 ini untuk mengadakan dialog yang sangat penting, terutama mengenai isu *climate change* yang erat berkaitan dengan sektor keuangan dan perbankan. Sebab perubahan iklim pasti akan sangat berpengaruh kedua aspek tersebut”

**Helen Clark**  
Perdana Menteri New Zealand  
periode 1999 - 2008  
Dalam Seminar Internasional LPS 2022,  
9 November 2022.



## Kemendagri Minta Pemda Manfaatkan GPM Tekan Inflasi Akhir Tahun

**JAKARTA** - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas penyediaan gerakan pangan murah (GPM) dari Badan Pangan Nasional untuk menekan laju inflasi terutama menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Ada bantuan untuk kegiatan pasar murah yang biayanya ditanggung, kemudian membantu fasilitasi untuk saling menghubungkan antara daerah surplus dan minus, selanjutnya ada subsidi angkut dari daerah surplus ke lokasi, tentunya ini fasilitas sangat berguna dan bermanfaat," kata Irjen Kemendagri Tomsis di Jakarta, Senin (12/12).



ANTARA/HO-Kemendagri

**Irjen Kemendagri Tomsis memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.**

Dia mengatakan Badan Pangan Nasional melakukan extra effort dalam rangka pengendalian inflasi pangan, salah satunya dengan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta operasi pasar dengan GPM. Namun sayangnya, kata

dia, belum semua pemda memanfaatkan fasilitas tersebut, misalnya dalam operasi pasar murah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional sampai akhir tahun 2022 hanya 20 provinsi dan 83 kabupaten/kota yang menggelar pangan murah atau ku-

rang lebih 235 titik.

Pada hal ini, paparnya, fasilitas itu dibiayai langsung oleh kas negara melalui skema tambahan uang persediaan (TUP). "Mohon menjadi atensinya, mohon untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau memang tidak ada yang menggunakan, uangnya akan dikembalikan ke kas negara. Di satu sisi teman-teman teriak di daerah, tapi satu sisi lagi fasilitasnya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Tomsis.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menjelaskan pihaknya telah membuka ruang bagi dinas di pemda yang membidangi pangan untuk bekerja sama menggelar operasi pasar murah. (ANTARA)

## Yogyakarta Siapkan Layanan Vaksinasi Penguat Massal bagi Lansia

**YOGYAKARTA** - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyiapkan pelayanan vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua secara massal bagi warga lansia, warga berusia 60 tahun ke atas, di kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Kamis (15/12).

"Meskipun layanan sudah mulai berproses di puskesmas, tetapi kegiatan vaksinasi massal untuk booster (penguat) kedua lansia ini diharapkan menjadi kick-off vaksinasi dan semakin banyak warga lansia yang mengaksesnya," kata Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kese-



ANTARA FOTO/Andreas Fitri Almkoko/wsj/pri

**Arsip Foto. Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga lansia di Yogyakarta.**

hatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah di Yogyakarta, Senin (12/12).

Menurut Lana, layanan vaksinasi dosis keempat atau dosis penguat kedua massal bagi warga lansia dibuka untuk warga Kota Yogyakarta

maupun warga dari daerah lain yang sedang berada di Kota Yogyakarta.

Warga lansia yang ingin mengakses layanan vaksinasi massal bisa mendaftar via daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

Syarat utamanya, warga yang bersangkutan berusia lebih dari 60 tahun dan sudah mendapat vaksinasi penguat pertama minimal enam bulan lalu. "Pendaftaran (vaksinasi) sudah mulai dibuka," kata Lana.

Dinas Kesehatan membuka layanan pendaftaran vaksinasi via daring guna memudahkan pengitinan kebutuhan vaksin COVID-19 dan tenaga kesehatan untuk pelayanan vaksinasi.

Produk vaksin COVID-19 yang digunakan dalam pelayanan vaksinasi massal bagi warga lansia disesuaikan dengan stok vaksin pemerintah, yakni vaksin buatan Pfizer. (ANTARA)